

**Tanggung Jawab Perdata
Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik
Di Kota Salatiga**

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum



**1956
Dewi Utari**

NPM : 322014023

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA**

2017

**Tanggung Jawab Perdata
Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik
Di Kota Salatiga**

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum

Dewi Utari

NPM : 322014023

Telah disetujui untuk diuji pada tanggal 28 bulan Juli tahun 2017

Pembimbing I



Dr. Dyah Hapsari Praunaningrum, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Arle Siswanto, S.H., M.Hum

Lembar Pengesahan

**Tanggung Jawab Perdata
Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik
Di Kota Salatiga**

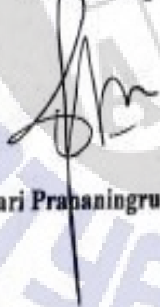
Dewi Utari

NPM : 322014023

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Dyah Hapsari Prananingrum, S.H., M.Hum

Pembimbing II



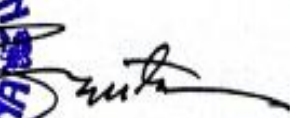
Arie Siswanto, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Limbu Rauta, S.H., M.Hum





PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Utari
NIM : 322014023 Email : mami.utari@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Tanggung Jawab Pendata Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik Di Kota Salatiga.
Pembimbing : 1. Dr. Dyah Prananingrum, S.H., M.Hum
2. Arie Siswanto, S.H., M.Hum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserijanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

1956

Salatiga, 16 Agustus 2017


6000
Tanda tangan & nama terang mahasiswa



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298 - 321212, Fax. 0298 321433
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI UTARI
NIM : 32 2014 023 Email : mami.uti@gmail.com
Fakultas : HUKUM Program Studi : MAESTER ILMU HUKUM
Judul tugas akhir : TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM PEMASANGAN LARANGAN
KABEL FIBER OPTIK DI KOTA SALATIGA

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 4 September 2017

1956

DEWI UTARI
Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Dr. Dyah Apsari P. S.H. M.Hum
Tanda tangan & nama terang pembimbing I

ARIE SISWANTO
Tanda tangan & nama terang pembimbing II

MOTO

Bekerjalah dengan niat sebagai

ibadah

Dan

Manfaatkan peluang kesempatan yang

diberikan Sang Pencipta untuk

menolong dalam kebaikan terhadap

sesama.....

Dengan begitu.....

Hidup akan terasa indah di saat

kita bisa bermanfaat untuk orang

lain dan lingkungan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian proses perkuliahan dari matrikulasi hingga terselesaikannya Tesis ini. Penulis ingin menyampaikan Terima Kasih kepada berbagai pihak yang selama ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan Penulis sepanjang perjalanan studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yaitu:

1. Papi Bedru, suamiku tercinta yang telah memberikan izin, dukungan dan semangat untuk sering terpaksa meninggalkan anak-anak kami sendirian di rumah, yang tak pernah lelah mendoakanku.
2. Kedua anak kami, Bagas dan Gola, Ibu kami, Ibu R.Ngt. Kustiyah, yang selalu memberi semangat dan doa selama penulis berkuliah sampai pada selesainya Tesis ini.
3. Bapak Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UKSW yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan arahan dan petunjuk yang membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. Dyah Hapsari Prananingrum, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberi masukan bagi penulisan tesis ini.
5. Bapak Arie Siswanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang juga dalam kesibukannya telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberi masukan bagi penulisan tesis ini.

6. Bapak Dr. Tri Budiono, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Marihot J. Hutajulu, S.H., M.Hum selaku penguji dan juga telah membantu penulis dalam tesis ini dalam memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini kedepannya.
7. Ibu Sri Harini Dwiyatmi, S.H., M.S dan Ibu Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Hukum dan juga sebagai teman dalam berdiskusi yang tidak pernah lelah dan selalu bersedia untuk berdiskusi dan memberikan arahan, petunjuk dan masukan bagi penulisan tesis ini.
8. Keluarga Besar Fakultas Hukum UKSW, para dosen dan staf yang telah membagi Ilmu Hukum yang dimiliki serta membantu penulis selama berkuliah dan menyelesaikan Tesis penulis.
9. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 2014-2015, yang telah berjuang bersama-sama, saling memberikan dorongan dan motivasi dari awal perkuliahan sampai pada terselesainya penyusunan Tesis ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam berkuliah dan menyelesaikan tesis penulis.

Semoga TESIS ini dapat bermanfaat bagi Pengembangan dan Pembangunan Ilmu Hukum serta bagi siapa saja yang membacanya.

VIVA IUSTITIA!

Salatiga, 31 Juli 2017

Kata Pengantar

Penulisan Tesis ini berjudul “Tanggung Jawab Perdata Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik Di Kota Salatiga”. Latar belakang penulisan tesis ini berkaitan dengan keinginan penulis untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Perdata terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemohon izin. Dalam Praktiknya pemasangan jaringan kabel fiber optik selalu bermasalah dan secara tidak langsung merugikan warga dan Pemerintah Kota Salatiga dari segi kenyamanan, keselamatan warga Kota Salatiga dan anggaran Pemerintah Kota Salatiga di dalam memanfaatkan trotoar, kanstin dan drainase sebagai bangunan pelengkap jalan dan badan jalan yang ada.

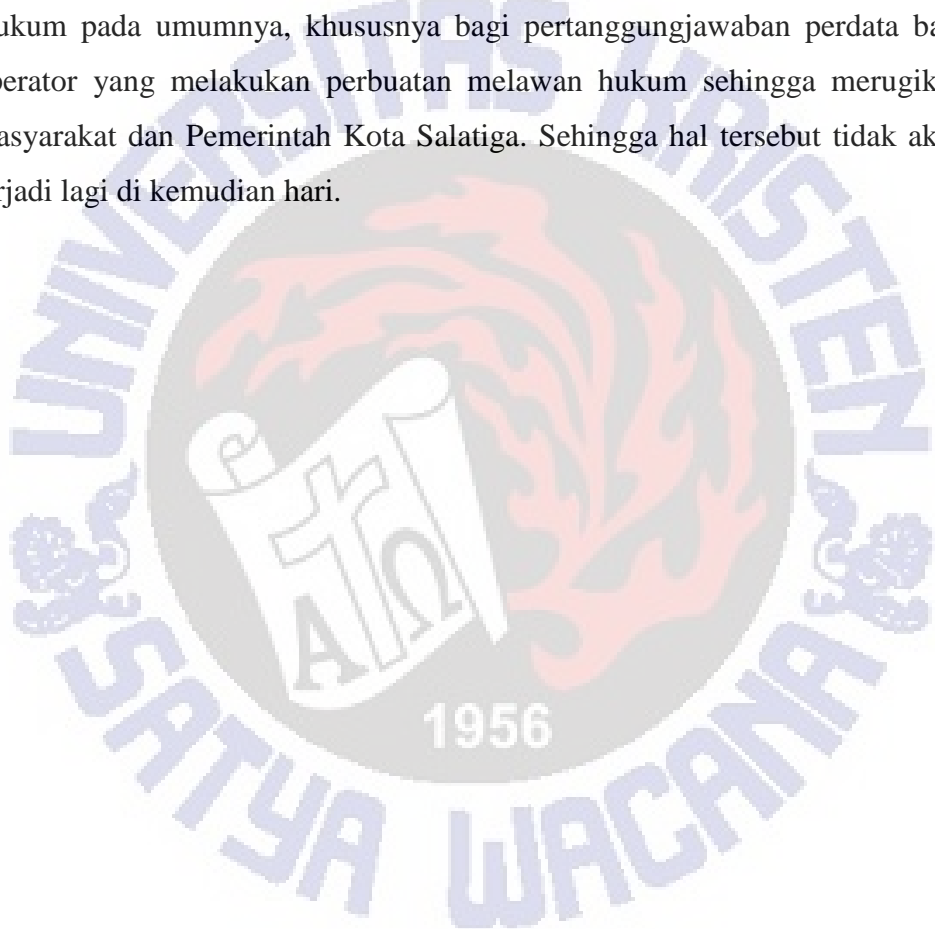
Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat melalui peningkatan pelayanan publik, etos kerja dan pola kerja yang efektif dan produktif sehingga dapat lebih menjaga fasilitas umum sebagai asset milik Negara serta dengan menawarkan perbaikan demi kemajuan dan kepastian hukum di Indonesia.

Pada Bab II akan menguraikan tentang Landasan Teoritik yang terdiri dari Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Teori Hak Menguasai Negara dan Teori Tanggungjawab Hukum dan Kepastian Hukum dan Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Perizinan Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik.

Pada Bab III, penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang Gambaran Umum Permasalahan yang terjadi di Kota Salatiga yang berkaitan dengan perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Pemerintah dan Masalah Yang Muncul Berkaitan Dengan Tanggung Jawab. Selain itu akan membahas

temuan data di Kota Salatiga yang berkaitan dengan Realita Hukum di Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Salatiga dan menganalisis tentang pertanggungjawaban perdata dari pemasangan jaringan kabel fiber optik.

Pada Bab IV, sebagai bab yang terakhir penulis akan menyampaikan saran dan kesimpulan yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya bagi pertanggungjawaban perdata bagi operator yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan masyarakat dan Pemerintah Kota Salatiga. Sehingga hal tersebut tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Tesis	iii
Moto	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Peraturan	xii
Daftar Foto	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstrak	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	10
C Tujuan Penelitian	10
D Manfaat Penelitian	11
E Landasan Teori	12
F Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Jenis Pendekatan	15
3. Sumber Data	15
4. Unit Amatan dan Unit Analisa	17
G Sistematika	18
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 19
A Kerangka Teori	19
1. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	19
2. Teori Hak Menguasai Negara.....	27
3. Tanggungjawab Hukum dan Kepastian Hukum.....	33
a) Tanggungjawab Perdata	34
b) Kepastian Hukum	54

B	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan	
	Perizinan Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik	58
1.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999	
	Tentang Telekomunikasi	59
2.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004	
	Tentang Jalan.....	59
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006	
	Tentang Jalan	60
4.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20	
	Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan	
	dan Penggunaan Bagian-Bagian	
	Jalan	61

BAB III TEMUAN DATA DAN ANALISIS 66

A	Gambaran Umum	66
1.	Perubahan Nomenklatur Struktur	
	Organisasi Pemerintah	67
2.	Masalah Yang Muncul Berkaitan Dengan	
	Tanggung Jawab	72
B	Temuan Data	75
1.	Realita Hukum Di Dalam Pemasangan	
	Kabel Fiber Optik Di Kota Salatiga	75
2.	Data Pertanggungjawaban Perdata Terkait	
	Dengan Pemasangan Jaringan Kabel Fiber	
	Optik Di Bagian-Bagian Jalan	79
C	Analisis Temuan Data	88
1.	Analisis Realita hukum di dalam Pemasangan	
	Kabel Fiber Optik di Kota Salatiga	88
a)	Hubungan Hukum di dalam Pemasangan	
	Jaringan kabel Fiber Optik di Kota Salatiga	88
b)	Fakta Pelaksanaan Perizinan Dalam	
	Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik	91
2.	Analisis Pertanggungjawaban Perdata	101
a)	Hak Menguasai Negara Atas Jalan	101
b)	Ijin Sebagai Persetujuan Yang Melahirkan	
	Perikatan	107
c)	Prinsip Tanggung Jawab Perdata Atas	

Unsur Kesalahan (<i>Liability Based On Fault</i>) Terhadap Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik	122
d) Prinsip Tanggung Jawab Perdata Berdasarkan Praduga Selalu Bertanggung Jawab (<i>Presumption of Liability</i>) Terhadap Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik	148
BAB IV PENUTUP	151
A Kesimpulan	151
B Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	



Daftar Peraturan

Peraturan Perundang-Undangan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Jalan Propinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Daerah.

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang.

Surat Persetujuan Izin Nomor 620/148/103 tanggal 20 Maret 2013 tentang
Persetujuan Izin.



DAFTAR FOTO

Foto 1	91
Foto 2	92
Foto 3	92
Foto 4	92
Foto 5	93
Foto 6	93
Foto 7	93
Foto 8	97
Foto 9	97
Foto 10	98



DAFTAR LAMPIRAN

Sample Surat Izin	161
Formulir A1 Permohonan Izin	162
Formulir A2 Surat Pernyataan	163
Formulir A3 Persetujuan Prinsip	164
Formulir A4 Izin Pembangunan / Penempatan	165



Abstrak

Pertanggung jawaban hukum perdata menjadi hal yang penting dalam masalah pemasangan jaringan kabel fiber optik di Kota Salatiga. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Pihak Operator seluler dalam pemasangan jaringan kabel fiber optik haruslah bertanggungjawab dan mengganti segala kerugian berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) maupun berdasarkan Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*) yang dibuatnya yang berakibat pada rusaknya trotoar, kanstin, jaringan drainase dan badan jalan sebagai fasilitas umum dan merugikan banyak pihak. Beranjak dari problematika tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana realita hukum di dalam pemasangan kabel fiber optic di Kota Salatiga? (2) Bagaimana pertanggungjawaban perdata terkait dengan pemasangan jaringan kabel fiber optik di bagian-bagian jalan?

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan eksploratif. Untuk menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Teori Hak Menguasai Negara dan Teori Tanggung jawab Hukum dan Kepastian Hukum.

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa hal yaitu (1) Pihak Operator Seluler haruslah bertanggungjawab berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability Based on Fault*) terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari pemasangan jaringan kabel fiber optic maupun berdasarkan Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*). (2) Pihak Operator seluler berkewajiban mengganti segala kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan trotoar yang ada. (3) Pemerintah Kota Salatiga haruslah menambahkan kuantitas dan kualitas personil di dalam mengawasi pemasangan jaringan utilitas di Kota Salatiga. (4) Perlu adanya diklat kompetensi sebelum penempatan personil di dalam bidangnya yang sesuai. (5) Perlu dibuatnya Perjanjian Kontrak Kerja di dalam terbitnya sebuah izin.

Kata kunci : Tanggungjawab Perdata, Jaringan Utilitas, Jaringan Kabel Fiber Optik.